

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, dari demokrasi Parlementer (1945–1959), demokrasi Terpimpin (1959–1965), demokrasi Pancasila (1965–1998) dan sekarang Reformasi, yaitu masa transisi menuju demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi dianggap sistem pemerintahan yang paling baik karena melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan, menurut Abraham Lincon “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” oleh karena itu rakyatlah yang memegang peranan dalam pemerintahan, karena rakyat adalah komunitas terbesar dalam pemerintahan. Suatu Negara dikatakan demokrasi apabila melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpinnya, oleh karena itu Negara demokrasi harus melakukan pemilihan umum yang bebas, berdasarkan hak pilih universal didukung oleh kebebasan berbicara, berserikat dan hak-hak lain yang dianggap perlu untuk melakukan perdebatan politik dan melaksanakan pemilu.¹

Dalam sistem demokrasi Pancasila, demokrasi adalah suatu yang tidak hanya melibatkan prosedur yang menekankan fungsi pemilu, tetapi juga lebih substantif, terutama yang melibatkan pengertian perwakilan kepentingan lapisan

bawah. Perwakilan kepentingan lapisan bawah adalah perubahan sistem politik lokal dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, rakyat yang menentukan dengan cara memilih secara langsung siapa orang yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan yang dianggap mampu menyampaikan aspirasi rakyat².

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di Indonesia bukan hal yang baru dan asing, karena sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda sampai sekarang masyarakat Indonesia sudah mengenal pemilihan kepala desa secara langsung di setiap daerahnya, yang berlaku hampir untuk semua desa diseluruh Indonesia. Memang diakui pemilihan kepala desa masih melibatkan skala pemilih yang hanya ribuan orang, tetapi pada dasarnya adalah sama dengan "Pemilukada" yaitu pemilihan lansung kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memilih secara langsung pemimpin yang diinginkan yang dilakukan dengan cara mencontreng ataupun mencoblos, di mana pemilukada ini mulai terkenal pada pertengahan tahun 2005. Pemilihan Kepala Daerah mampu mempercepat pendewasaan demokrasi di Indonesia, dan sekaligus proses pendidikan politik yang tepat dan langsung dirasakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih.

Dengan pemilihan kepala daerah ini, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom, sebagaimana rakyat memilih Presiden dan wakil Presiden (eksekutif), dan anggota DPD, DPR, dan DPRD (legislatif). Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari Undang-undang No.22 tahun 1999. Secara teknis petunjuk pelaksanaan pemilukada tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah.

Pada prinsipnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah bahwa secara hukum sekarang tersedia ruang bagi rakyat, untuk langsung menunjukkan kedaulatan dalam memilih pemimpinnya. Aspirasi rakyat tidak dimanipulasi dan dibohongi.

Sistem pemilihan langsung bukan sekedar kemenangan demokrasi partisipatoris dan demokrasi elit dalam pusaran arus perubahan politik di Indonesia, lebih dari itu merupakan pondasi bagi bangunan demokrasi politik daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 6 tahun 2005, akhirnya pemilukada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pemilukada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokrasi.

Membahas tentang pemilukada tidak terlepas dengan bagaimana seorang gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat, baik dengan melakukan pemilihan umum ataupun dengan penetapan seperti yang dilakukan masyarakat Yogyakarta yaitu masyarakat menghendaki Sultan sekaligus sebagai gubernur

melalui pentapan mempunyai konsekuensi masing-masing, tidak terlepas dari untung atau rugi melakukan pemilu secara langsung ataupun penetapan. Begitu pula dengan pemilihan gubernur secara langsung yang di lakukan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008, pemilihan ini pertama kali di lakukan berdasarkan keinginan rakyat NTB secara langsung sesuai dengan kriteria pemimpin pilihannya.

Muhammad Zainul Majdi MA (Tuan Guru Bajang) atau sering di panggil TGB adalah salah satu dari calon gubernur NTB yang mencalonkan diri, dan untuk pertama kalinya kepala daerah terpilih berasal dari kalangan ulama dan organisasi masyarakat Islam. TGB adalah tokoh dari organisasi kemasyarakatan yang bernama Nahdatul Wathan (NW). Terpilihnya TGB menjadi gubernur NTB selain membuktikan mengakarnya Nahdatul Wathan di NTB, juga memperlihatkan pergeseran acuan pemilih kepada tokoh muda dan tokoh nasionalis Islam. TGB adalah gubernur termuda di Indonesia yang menjabat sebagai kepala daerah pada usia 36 tahun.

Nahdatul Wathan (NW) adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid (kakek TGB) yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1953. Nama organisasi Nahdatul Wathan ini di ambil dari dua kata Arab yaitu Nahdlah dan Wathan, Nahdlah artinya kebangkitan, pergerakan sedangkan Wathan artinya tanah air dan Negara. Dengan demikian menurut pengertian bahasa Nahdatul Wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan Negara atau membangun Negara. Sedangkan secara istilah Nahdatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunah wal jama'ah 'ala Mazhabil

Imamisy Syafi'i memusatkan kegiatannya pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah.

Nahdatul Wathan merupakan ormas paling besar di NTB, NW yang merupakan ormas sejak pemilu 1955 memang merupakan pendukung Masumi. Selama puluhan tahun sejak berdirinya tahun 1937, NW telah melakukan proses pencerahan umat Islam di Lombok. Fasilitas-fasilitas sosialnya berkembang pesat hingga ke skala yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid (Maulana Syeh) sendiri. Kegiatan sosialnya menjangkau ratusan ribu orang dan meliputi ribuan aset di seluruh NTB dan di luar NTB. Nahdatul Wathan diterima, didukung, dan menjadi tumpuan harapan hampir seluruh umat Islam di NTB umumnya dan umat Islam di Lombok secara khusus. Sampai era 1980-an, Maulana Syeh dan Nahdatul Wathan praktis tidak menunjukkan ketertarikan politik yang secara khusus. Kerja sosial tetap menjadi tujuan pertumbuhan Nahdatul Wathan yang semakin menjalar kemana-mana. Keputusan Maulana Syeh untuk mendukung Golkar pada tahun 1971, lebih disebabkan alasan ideologis daripada alasan politis karena hanya Golkar yang ketika itu mampu membendung arus komunisme.³

Demikian pula ketika beliau memutuskan keluar dari partai Golkar pada tahun 1982 dan membebaskan pendukungnya untuk memilih salah satu partai. Keputusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai manuver politik melainkan cerminan dari kekecewaan mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap Orde Baru

yang semakin didominasi militer yang represif terhadap umat Islam⁴. Baru pada tahun 1987 ketika memutuskan kembali ke Golkar, itulah pertama kali beliau mengambil sebuah keputusan politik. Sejak saat itu, meskipun Nahdatul Wathan tetap diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan sosial, namun mulai lebih diperhitungkan sebagai sebuah struktur politik informal. Politik pula yang akhirnya melatarbelakangi terjadinya tragedi/konflik September 1998 dan menjadi embrio munculnya dua kubu yaitu Nahdatul Wathan Anjani dan Nahdatul Wathan Pancor.

Konflik yang terjadi di internal NW akibat perebutan kekuasaan antara dua anak pendiri NW yaitu Siti Rahun dan Siri Raihanun. Setelah TGH. Zainuddin Abdul Majid meninggal dunia kedua putri pendiri NW ini merasa masing-masing menganggap mempunyai hak untuk menggantikan posisi sebagai Pengurus Besar Nahdatul Wathan (PBNW). Dijajaran pengurus organisasinya telah lahir tiga kubu dalam perebutan kekuasaan. Yang pertama, kubu yang loyal terhadap Siti Rahun, yang kedua, kubu yang loyal terhadap Siti Raihanun. Sedangkan kubu ketiga adalah kubu yang netral.

Pada muktamar ke X yang diadakan di Kota Praya Lombok Tengah, terpilih lah Siti Raihanun sebagai ketua PBNW yang baru. Akan tetapi hal ini menjadi polemik yang berkepanjangan dikalangan tubuh NW. Masalah

1. Nahdatul Wathan yang muncul adalah apa dan bentuk terhadapan kepemimpinan Siti

Kubu yang kontra menyatakan bahwa muktamar ke X yang diadakan di Kota Praya itu tidak sah dan cacat hukum. Dengan isu inilah kubu yang kontra dimotori oleh Siti Rahun mengadakan muktamar reformasi NW, diselenggarakan pada September 1999 di Pancor Lombok Timur. Muktamar ini merupakan satu langkah yang diambil untuk membuat pengurus NW tandingan. Yang kemudian menetapkan TGB. Zainul Majdi sebagai PBNW (tandingan).

Dengan terbentuknya Pengurus Besar NW hasil muktamar reformasi maka secara de-pakto organisasi NW memiliki dua kepemimpinan yaitu PBNW hasil muktamar ke X yang diketuai oleh Siti Rahun di Anjani (anak pendiri NW) dan NW pancor yang dipimpin oleh TGB. Zainul Majid (cucu pendiri NW).⁵

Organisasi Nahdatul Wathan (NW) saat ini di pegang oleh TGB, yang tidak lain adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terpilih pada pemilu priode tahun 2008 sampai tahun 2013. Nahdatul Wathan didirikan oleh kakek dari TGH. M Zainul Majdi sehingga setelah kakeknya wafat amanah untuk meneruskan NW di pegang oleh M. Zainul Majdi MA (TGB). NW di pegang oleh TGB dari sebelum TGB menjabat sebagai Gubernur NTB. Kegiatan yang dilakukan TGB adalah memberikan pengetahuan pada masyarakat yang ada di NTB, yaitu dengan cara melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. NW mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa bagi masyarakat NTB, terutama bagi masyarakat Lombok, karena NW sudah ada sejak jaman penjajahan dan NWlah yang berperan dalam mengusir penjajah di pulau Lombok, beberapa kali Tuan Guru Haji

⁵ Fahrurrozi, *Mobilisasi Politik Kader Nahdatul Wathan Pancor dengan DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB studi kasus dalam Pilkada NTB 2008*, tesis program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Zainuddin Abdul Majid (kakek TGB) terlibat dalam peperangan melawan pemerintah Belanda. Bahkan adik kandung beliau Tuan Guru Haji Ahmad faisal meninggal dunia ketika bertempur dalam medan peperangan.

Tidak hanya itu masyarakat juga di berikan ilmu pengetahuan yaitu pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah sampai saat ini, dalam bidang pendidikan NW mendirikan lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai universitas (STKIP Hamzanwadi, IAIH, universitas Nahdatul Wathan dan masih banyak lagi). Sedangkan dalam bidang sosial NW berfungsi sebagai motivator dan dinamisator yang mengatur pola hubungan antar warga di tengah komunitas tertentu di dalam pengembangan nilai keislaman dalam kehidupan, yaitu amal jariyah, gotong royong, keikhlasan berjuang, pemberian santunan kepada fakir miskin, yaitu yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang jompo, penderita cacat, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan rumah-rumah ibadah. Sedangkan kegiatan NW dalam bidang dakwah selain majlis dakwah dan majlis taklim, juga dilakukan dalam bentuk peringatan hari hari besar Nasional, Islam, NW, lailatul Ijtima', hiziban, waridan, pembacaan barzanji, tahfizul Quran, syafa'ah yang bernafaskan Islam, penerbitan dan lain-lain⁶. Oleh karena beberapa kegiatan di atas yang di lakukan oleh NW sehingga NW dirasakan sangat bermanfaat dan mempunyai pengaruh yang kuat pada masyarakat.

Pemilukada langsung tidak hanya di lakukan karena mempunyai banyak kelebihan dan ingin menjunjung demokrasi di Indonesia secara sepenuhnya, tetapi

pemilukada dilakukan karena faktor masyarakat yang menginginkan pemimpinnya seperti yang diinginkan atau diharapkan, oleh sebab itu dalam pemilukada faktor masyarakat sangat menentukan seseorang terpilih menjadi kepala daerah, disamping memang faktor dari calon Gubernur ataupun kepala daerah tersebut. Apakah calon gubernur tersebut memang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam memimpin masyarakat, karena kepemimpinanlah salah satu faktor yang sangat menentukan supaya suatu daerah dapat berkembang semakin baik.

Pengaruh NW terhadap terpilihnya TGB menjadi gubernur NTB dapat dilihat dari hasil pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2008, dimana TGB di tetapkan sebagai gubernur NTB karena berhasil mendapatkan suara tertinggi dan mengalahkan saingannya dalam pemilukada NTB. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh data bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon Tuan Guru Bajang KH. M. Zainul Madjidi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM. dengan perolehan suara sebanyak 847.976; diikuti oleh pasangan Calon Drs. H. Lalu Serinata dan H.M. Husni Djibril, B.Sc. dengan perolehan suara sebanyak 576.123; pasangan Calon DR. H. Zaini Arony, M.Pd. dan Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dengan perolehan suara sebanyak 387.875; dan pasangan Calon Ir. H. Nanang Samodra KA., M.Sc. dan Muhammad Jabir, SH., MH. dengan perolehan suara sebanyak 370.919. Rekapitulasi hasil perhitungan Suara oleh KPU Kota Bima.

Sesuai hasil rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi NTB menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu : KH. M. Zainul Madjdi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM. yang memperoleh suara sebesar 847.976 atau 36,72% suara, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270/441/KPU.NTB/VII/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2008-2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008⁷.

Jumlah penduduk NTB secara keseluruhan sebanyak 4.363.756, penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 1.105.582 jiwa. Dengan data di atas dapat dilihat bagaimana organisasi NW berpengaruh sehingga kemenangan TGB sangat di rasakan di Kabupaten Lombok Timur meskipun tidak semua masyarakat Lombok Timur ikut organisasi NW tetapi masyarakat mempercayai TGB mampu menjadi pemimpin karena di lihat dari beberapa faktor yang telah di jelaskan di atas. Oleh sebab itu disini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh organisasi (NW) dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan di NTB, apakah masyarakat memilih TGB karena beliau adalah penerus NW, dan menganggap NW sangat berjasa terhadap masyarakat NTB,

⁷Lihat <http://www.kpud-ntbprov.go.id/> di akses pada tanggal 12 desember 2012.

terkhusus Lombok Timur apakah masyarakat memang menganggap TGB mampu menjadi pemimpin yang dapat menjadikan NTB lebih baik lagi.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana Pengaruh Nahdatul Wathan (NW) Terhadap Kemenangan Tuan Guru Bajang Dalam Pemilihan kepala Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Nahdatul Wathan (NW) Terhadap Kemenagan Tuan Guru Bajang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Lombok Timur.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu organisasi kemasyarakatan dapat menggiring suara masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu untuk memilih kandidat terkenal yang di calonkan oleh organisasi tersebut, apakah sekarang masyarakat sudah mampu memilih calon yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dengan pengetahuannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu:

“Untuk mengetahui pengaruh organisasi NW dalam pemilukada Nusa Tenggara Barat tahun 2008., terutama di Kabupaten Lombok Timur”.

D. Manfaat penelitian

Harapan dari penelitian yang dilakukan ini adalah dapat bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Namun ada dua manfaat yang diperoleh yaitu,

- I. Manfaat Akademik : Menambah khasanah keilmuan dalam studi ilmu politik, terutama kajian mengenai pengaruh suatu organisasi dalam memenangkan kader yang dicalonkan untuk menjadi kepala daerah.
- II. Manfaat praktis : Dapat dijadikan bahan referensi dalam berbagai studi mengenai peta politik di Nusa Tenggara Barat terutama di Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Teori

1. Pengaruh

Kata "Pengaruh" dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Jadi, Pengaruh adalah Kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.

Dalam kaca mata politik tentu saja pengaruh itu sangat dibutuhkan. Sebuah kekuasaan sangat berhubungan erat dengan pengaruh. Bahkan tak heran banyak kalangan yang sulit membedakan pengaruh dan kekuasaan. Kekuasaan dan Pengaruh ialah dua konsep yang berbeda. Diantaranya terdapat konsep pokok, dan bentuk khususnya. "kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh, ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

Pada umumnya, para pemimpin lebih sering menggunakan taktik-taktik mempengaruhi yang secara sosial dapat diterima, memungkinkan akan efektif untuk suatu sasaran tertentu, memungkinkan tidak membutuhkan banyak waktu, usaha atau biaya. Jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas seperti itu telah melibatkan ke dalam aktivitas kepemimpinan. Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu dan seseorang berupaya agar tujuan organisasi tercapai, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya.

Adakalanya, kekuasaan berkaitan dengan pengaruh sehingga disebut sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi. Kalau kekuasaan mensyaratkan adanya "keterpaksaan" sedangkan pengaruh, menurut Miriam Budiardjo,

mempengaruhi perilaku si B, pasti ada sesuatu yang dimiliki si A sehingga mampu mempengaruhi perilaku si B. misalnya, uang, informasi penting, hak membuat peraturan, dan lain-lain. Sesuatu yang dimiliki si A itulah yang disebut dengan sumber daya politik. Jadi si A mampu mempengaruhi si B, karena si A mempunyai sumber daya politik yang tidak dipunyai oleh si B⁸.

Dalam Ilmu Politik, pengaruh dan kekuasaan bisa diukur dengan melihat Wilayah Pengaruh dan Bidang Pengaruh yang dikuasai oleh si Aktor. misalnya seorang Ustad/ulama punya bidang pengaruh dalam soal keagamaan saja, sedangkan bidang ekonomi tidak. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang konsisten ditunjukkan dan sebagai yang diketahui oleh pihak lain ketika seseorang berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain.

Kekuasaan dan Pengaruh ialah dua hal yang berbeda, sehingga ada yang menganggap kekuasaan merupakan bagian dari pengaruh dan bahkan sebaliknya pengaruh merupakan bagian dari kekuasaan. Perilaku dalam mempengaruhi tergantung pada position power dan personal power yang dimiliki pemimpin. Hasil dari proses mempengaruhi juga mempunyai efek umpan balik terhadap perilaku pemimpin. Dengan demikian, hasil dari usaha

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 2008. Hal 65

mempengaruhi merupakan akumulasi dari keterampilan mempengaruhi, perilaku mempengaruhi, dan kekuasaan pemimpin.

Pengaruh biasanya tidak merupakan salah satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan faktor lain. Akan tetapi sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, pengaruh kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering kali cukup berhasil.⁹

Kelompok kepentingan (ormas) memberikan pengaruh yang besar kepada pemerintah di bandingkan yang lain. Dengan keterampilan yang berbeda yang dimiliki dapat di gunakan untuk mengambil keuntungan untuk organisasi tersebut. Pengaruh dapat terjadi karena empat faktor:

1. Sangsi, berupa ancaman yang diberikan kepada anggota apabila tidak melakukan apa yang di perintahkan. Ini berkaitan dengan pengaruh dan kekuasaan.
2. Legitimasi, yaitu berupa pengakuan yang di berikan oleh anggota kepada seseorang atau kelompok dan hal tersebut patut di hormati. Asalkan hal tersebut sesuai dengan asas dan prosedur.
3. Keanggotaan, pengaruh juga tergantung pada kelompoknya Karen menyangkut kepadatan dan anggota yang jelas. Semakin banyak anggota kelompok maka kecurangan akan tinggi akan dicapai. Sebaliknya apabila

⁹Lihat <http://id.com/power-authority-influence-persuasion>, diakses tanggal 4 November 2012

keanggotaan rendah, hal ini akan memberikan efek perpecahan antar kelompok.

4. Sumber daya, sumber daya dari organisasi berupa keuangan.

Dari hal di atas dapat disimpulkan, semua kelompok kepentingan (ormas) berkontribusi untuk mewarisi sumber daya politik yang substansial untuk menentukan pengaruh mereka. Bisa diarahkan konteks eksternal lebih penting daripada organisasi internal.¹⁰

2. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik.¹¹

Dalam undang undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang di atas maka dalam bab II terdapat asa, ciri dan sifat dari ormas yaitu asas ormas tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD

¹⁰Hague and Harrop, *Comperative Government and Political an Introduction edition 6th* Palgrave Macmillan, New York, 2004hal 175

¹¹Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/organisasimassa>.diakses pada tanggal 2 Oktober 2012

1945, pasal 3 berbunyi ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sifat dari ormas itu sendiri yaitu ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan tidak berafiliasi pada partai politik.

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia sangat banyak tidak hanya organisasi yang di dirikan oleh warga Indonesia sendiri tetapi juga ormas asing, oleh sebab itu tujuan, fungsi dan ruang lingkup dari pendirian ormas sangat penting untuk diketahui berdasarkan UU No 8 tahun 1985 tentang ormas yang tercantum dalam bab III sebagai berikut:

Tujuan pembentukan ormas tercantum dalam pasal 5 yang berbunyi:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Memperkuat persatuan bangsa dan/atau
6. Mewujudkan tujuan Negara

Fungsi dari ormas menurut UU no. 8 tahun 1985:

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota

2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Sarana penyalur aspirasi masyarakat
4. Wadah peranserta dalam memperkuat persatuan dan/atau
5. Sarana mewujudkan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹²

Dari UU no. 8 tahun 1985 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.¹³

Dengan demikian maka pada dasarnya adalah aspirasi dan yang bisa membedakan itu hanyalah hasil yang dirasakan dari tujuan yang hendak dicapai apakah bermanfaat pada kepentingan anggota saja atau seluruh rakyat yang menjadi anggota atau tidak dari organisasi tersebut. Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar intervensi masyarakat maka ormas juga sering dikatakan sebagai non government organization (NGO)

¹²Undang undang No 8 tahun 1985 tentang organsasi masyarakat

¹³Lihat <http://co.id/organisasi-masyarakat>. Diakses pada tanggal 2 November 2012

tetapi pada tahun 1983 istilah ini diganti karena NGO umumnya dipakai oleh barat.

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil.

Pemilukada menurut UU no. 32/2004 tentang pemeritahan daerah adalah :

“bahwa pelaksanaan pemilukada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya”.

Dan pasal 56 ayat 1 UU no. 32 tahun 2004 berbunyi :

“kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.¹⁴

Lahirnya UU no.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana pemilihan umum. Dalam pemilihan kepala daerah masyarakatlah yang kini memegang

kunci, mereka bisa menentukan dan sekaligus langsung untuk memilih calon yang mereka anggap paling tepat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah momentum yang paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraannya yang berlangsung lancar dan damai tetapi juga diukur dari hasil yang diperoleh, apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pemilihan ini hanya dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah.

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Secara umum Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung

Penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan ini adalah bagian dari pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung ini adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atas mandegnya pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2005, yang diselenggarakan di 226 daerah, yang meliputi 11 Provinsi, 180 kabupaten dan 35 kota¹⁵.

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung senantiasa diharapkan dapat membawa perubahan berdemokrasi kearah yang lebih baik, serta dapat pula memperkokoh semangat demokrasi di daerah khususnya. Dalam proses penyelenggaraannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara bertahap. Tahapan dalam pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendaftaran pemilih calon gubernur dan wakil gubernur
2. Penentuan calon gubernur dan wakil gubernur
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik
4. Pengadaan kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah).

¹⁵ Lihat <http://www.kabarindonesia.com/berita>. Tinjauan Singkat Tentang Pilkada Tahun 2005.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan diharapkan pemilihan langsung ini menciptakan suasana politik lokal yang berorientasi terhadap input dari rakyat dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan terpenuhinya tuntutan maupun dukungan rakyat maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ketika terciptanya kerukunan diantara masyarakat berarti pemerintah telah berhasil membuat kebijakan publik yang memenuhi kepuasan publik sehingga berimplikasi pada stabilnya konstelasi politik daerah. Dalam hal ini, Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk membentuk sendiri segala bentuk yang mengatur kehidupan rakyat.

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah maka Pemilukada langsung mempunyai kelebihan dan kekuarangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena dukungan oleh masyarakat yang memberikan suara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah mengerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan keridakstabilan politik dan ekonomi daerah.

2. Kepala daerah tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkan kandidat. Artinya, kepala daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut, apabila kepala daerah tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai yang seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar benar berpihak pada rakyat.
3. Sistem pemilihan lebih akuntabel dan adanya akuntabilitas publik dibandingkan sistem lain yang selama ini di gunakan, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih lagi. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh masyarakat dan politisi.
4. *Checks* dan *balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
5. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Kekurangan dari pemilukada secara langsung adalah:

1. Dana yang dibutuhkan besar

Dana yang dibutuhkan dalam pemilukada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana ini memberikan beban yang sangat berat kepada daerah, apalagi pemilukada langsung menggunakan sistem dua putaran (*Two round atau run off system*), di tengah keharusan untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain penyelenggaraan pemilukada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

2. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pemilukada langsung sangat terbuka. Konflik terjadi akibat pemilukada langsung bersifat elit namun lebih besar kemungkinan bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat patrimonial dan primateal di mana pemimpin dapat

3. Aktifitas rakyat terganggu

Kesibukan rakyat dalam menjalankan aktifitas sehari hari dengan mudah terganggu karena pelaksanaan pemilukada langsung. Masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan mensiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu yang manuver yang dilakukan oleh para calon.¹⁶

Adapun manfaat dari pelaksanaan pemilukada langsung bagi perkembangan atau peningkatan demokrasi daerah. Manfaat tersebut bersifat universal yaitu untuk Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya, supaya lebih baik kedepannya lagi yaitu:

1. Pendidikan Politik

Pemilukada langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon dan pentingnya program kerja (visi dan misi), kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi.

¹⁶ Akhmad Syafruddin, *Analisis Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2005, hal 128 131

2. Kanchah Pelatihan (*Training Ground*) dan pengembangan Demokrasi

Pemilukada langsung merupakan kanchah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam suatu bangsa. Pengalaman di Negara-negara maju, federasi menunjukkan hasil pemilu parlemen lokal dan pemilukada berpengaruh terhadap pusat. Mereka yang tidak mempunyai atau kehilangan peluang partisipasi dalam pemilukada atau pembuatan kebijakan, dengan kehendak melakuakn partisipasi politik, masyarakat akan melakukan kegiatan untuk mengakses informasi yang cukup tentang berbagai hal. Mereka akan mencari tahu syarat menjadi calon, pantas di dukung atau tidak dan sebagainya¹⁷

3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Persiapan Karier Politik Lanjutan

Pemilukada langsung menciptakan sebuah landasan bagi prospektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik serta menyusun anggaran. Dari para pemimpin di tingkat lokal diharapkan mampu melahitkan politisi-politisi nasional handal. Pemilukada langsung akan sangat bermanfaat sebagai wahana meniti karier politik.

¹⁷ H. syaukani, HR, Prof. DR. Afan Gaffar, MA, DR. M. Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta dan Pusat Pengajian Etika Politik dan Pemerintahan 2002, hal 5

4. Membangun Stabilitas Politik dan Mencegah Sparatisme

Partisipasi masyarakat dalam politik formal memalui pemilukada langsung dan praktek-prakteknya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan cara out dapat diharakan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan, dan stabilitas politik. Dengan tercapainya harmoni sosial maka akan mengurangi sparatisme.

5. Kesetaraan Politik (*Political Equality*)

Dengan pemilukada langsung maka kesetaraan politik di antara berbagai kompomen masyarakat akan terwujud. Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih kepala daerah. Disamping itu, warga juga akan ikut dalam membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Partisiasi yang luas terkandung didalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah.

6. Mencegah Konsentrasi Kekuasaan di Pusat

Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Dengan pemilukada, kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas ke daerah sehingga pemilukada

merupakan mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin dan kelompok marginal, serta perempuan.

7. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diperkuat karena pemilukada langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat oleh karenanya akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya, dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah, satu suara dalam pemilihan lokal merupakan suatu mekanisme unik bagi penduduk untuk menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kepala daerah.

8. Meningkatkan Kepekaan Politik Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sensitifitas pemerintah meningkat karena kepala pemerintah ditempatkan secara tepat, dengan pemilukada langsung itu, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan bagaimana agar kebutuhan tersebut dapat di penuhi dengan cara efektif.

F. Definisi konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kerancuan. Konsep adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang dimaksud atau konsep adalah abstraksi

konsep ini suatu fenomena yang digambarkan atas dasar generalisasi dan sejumlah

karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahan pemahaman.

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Jadi, Pengaruh adalah Kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.

2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial.

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung

Dalam penelitian ini pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud adalah rekrutmen politik yang terbuka yaitu penyeleksian

rakyat terhadap tokoh-tokoh menurut rakyat mampu memimpin daerah sehingga diusulkan atau mencalonkan diri melalui partai politik dan gabungan partai politik sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Menurut Winarno Suradimad adalah:

Penelitian deskriptif ini merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang ada saat ini dengan teknik interview dan dokumentasi¹⁸.

Sifat penelitian Deskriptif pada umumnya adalah menuturkan atau menceritakan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami, pandangan sifat yang tampak, atau suatu proses yang sedang berlangsung,

pengaruh yang sedang bekerja, kelalaian yang sedang terjadi, kecenderungan yang tampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

2. Lokasi Penelitian

Penulisan ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Kabupaten Lombok Timur pada khususnya.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang berupa keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, serta arsip tentang Nahdatul wathan dan pemilihan Tuan Guru Bajang menjadi Kepala Daerah (jika diperlukan).

4. Unit Analisis Data

Unit Analisis Data pada penelitian ini adalah :

a. Organisasi Nahdatul Wathan

- b. Orang-orang dan masyarakat yang berperan dalam kemenangan TGB.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumbernya yaitu anggota sampel dan responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dengan cara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini berbicara tentang deskriptif daerah yaitu sejarah berdirinya NW, lambang NW, profil TGB sebagai calon gubernur, visi dan misi TGB dan sebagainya.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah :

- a. Interview atau wawancara

Seperti arti dari wawancara atau interview teknik ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan pada organisasi terkait dan warga masyarakat seperti yang tercantum dalam unit analisa yaitu Nahdlatul Wathan sebagai organisasi keagamaan, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemilihan gubernur NTB

khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Timur sebagai objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memanfaatkan buku, dokumen, literatur, catatan yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun beberapa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah apa saja peran yang dilakukan NW untuk memenagkan TGB, sejarah berdirinya organisasi keagamaan Nahdatul Wathan, dan profil TGB selaku calon dari NW.

H. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data supaya mudah di baca dan dipahami. Dalam penelitian ini penyusunan akan menggunakan model analisi kualitatif, yaitu usaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran atau dari berbagai data yang di dapatkan. Analisis kualitatif ini dilakukan secara interpretative, menurut Brian Fay:¹⁹

“Pendekatan interpretative dalam ilmu sosial dimulai dengan pemahaman terhadap fakta atau data yang dikumpulkan dan kemudian dicoba dan dianalisis melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris”

¹⁹ Brian Fay, *Teori Sosial dan Praktek Politik*, Graffiti press 1991, hal 55

